

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara tentang peran mahasiswa dalam politik secara umum, disini kita lihat realita yang ada sekarang kesadaran berpolitik mahasiswa kini mulai memudar, hal itu terjadi akibat kultur modernisasi dan globalisasi yang cenderung mengikis idealisme. Sikap apatis mahasiswa dalam melihat kondisi sekitarnya secara fakta dan realita yang menyangkut masa depan bangsa dan negeri ini serta keberadaan orang banyakpun sudah merajalela tertanam dalam diri mahasiswa hari ini. Sungguh tragis, kepekaan dan sikap kritis yang seharusnya menjadi *mind style* dan paradigma idealis para mahasiswa dalam berfikir kini malah justru dilupakan bahkan ditinggalkan. Jiwa reformis dan revolusioner seakan menghilang dalam sanubari hati nurani mahasiswa sebagai kaum intelektual muda yang akan menjadi *iron stock* (cadangan dimasa depan) baik berupa ide dan konsep pemikirannya, kontribusi dan kerja-kerja nyatanya.

Adapun perilaku hedonis dengan budaya konsumerisme yang sering dilakukan para mahasiswa dengan mengatasnamakan modernitas dan *life style* seakan-akan menyempurnakan sikap dan kondisi mahasiswa hari ini yaitu apatis dan hedonis sehingga menghasilkan sifat-sifat personal yang kerdil yaitu individualistik apatis-hedonis *life style*. Mementingkan diri sendiri tidak peduli

dengan keadaan yang ada, kondisi sekitar juga orang lain, miskin ide, mudah frustrasi, bertingkah laku bodoh dan semaunya. Itulah sifat dan sikap yang terlihat dalam diri mahasiswa hari ini.

Dalam dunia perpolitikan khususnya di Indonesia, terjadinya perselisihan dan per seteruan para politisi bukanlah hal yang asing didengar karena biasanya kawan bisa menjadi lawan. Proses lobi-lobi politik yang sengit terjadi pada pemerintahan, ditambah banyaknya berita korupsi oleh pejabat negara yang disuguhkan dalam program berita televisi maupun dalam media massa secara terus-menerus. Adanya keterbukaan informasi seperti ini namun menjadikan generasi muda ataupun mahasiswa di Indonesia malah menjadi acuh pada pemerintahan sendiri bahkan tidak ingin tahu apa yang terjadi pada keadaan negara ini, padahal dalam bentangan sejarah negeri ini, mahasiswa memiliki peran besar sebagai agen perubahan.

Mahasiswa telah terbukti selalu menjadi pelopor dalam sejarah suatu bangsa. Pada konteks Indonesia, pengalaman empirik juga membenarkan sekaligus mempertegas realitas tersebut. Catatan terkini memperlihatkan bahwa dengan kemahirannya dalam menjalankan fungsi sebagai Intellectual Organic, mahasiswa telah berhasil meruntuhkan kepemimpinan soekarno, memporak-porandakan rezim Orde Baru dan menghantarkan Indonesia kedalam suatu era yang saat ini sedang bergulir, yakni: "Orde Reformasi".

Menghadapi tantangan serta peluang semacam itu, maka diperlukanlah sebuah revitalisasi peran fungsional organisasi mahasiswa kedaerahan. Ini dibutuhkan untuk membentuk pelajar dan mahasiswa yang peduli dan bertanggungjawab terhadap pembangunan daerah secara cerdas, kreatif, dan inovatif terutama dalam hal perpolitikan daerah.

Selanjutnya, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah yang terkenal dengan selogannya sebagai Kota Pendidikan, karena memiliki kurang lebih 140 (seratus empat puluh) perguruan tinggi baik negeri maupun swasta sehingga tidak mengherankan jika banyak putra daerah dari luar Yogyakarta yang menimba ilmu di daerah istimewa ini. Banyak tokoh-tokoh nasional yang telah lahir dari hasil didikan di kota ini. Dari faktor inilah berbagai organisasi lahir di kota ini, baik itu Organisasi Mahasiswa (Ormawa), Organisasi Masyarakat (Ormas) maupun Organisasi yang berbasis kedaerahan (organisasi etnis). Dalam organisasi etnis itu sendiri terdiri dari kurang lebih ratusan organisasi yang mencakup wilayah propinsi atau kabupaten., yang Termasuk dalam hal ini mahasiswa Cilacap yang berada di Yogyakarta pada tahun 90-an juga pernah mempunyai wadah organisasi kedaerahan yang disebut dengan “Kesatuan Siswa Mahasiswa Wijaya Kusuma (KESIMAJAYA)”, yang pada saat itu cakupannya meliputi wilayah Karesidenan Banyumas

Organisasi “Kesatuan Siswa Mahasiswa Wijaya Kusuma (KESIMAJAYA)” merupakan Organisasi yang berbasis kedaerahan (organisasi etnis) yang berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Organisasi ini tidak lagi aktif sampai hampir satu dasa warsa (dengan alasan yang kurang jelas). Berawal dari keinginan untuk mempersatukan seluruh mahasiswa Cilacap yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta, maka pada tanggal 15 Maret 1998 berdirilah himpunan mahasiswa Cilacap di Yogyakarta yang selanjutnya disebut HIMACITA. Hal ini juga didukung oleh pemerintah kabupaten Cilacap sendiri dengan adanya bantuan yang berbentuk kesekretariatan di Yogyakarta, yang dalam proses panjang telah menjadi aset daerah dari Pemda Cilacap pada tahun 2004, dan HIMACITA mempunyai hak mengelola kesekretariatan yang beralamat di Jalan Amarta Raya No.5 RT 06 RW 36 Dusun

Jongkang Desa Sariharjo Ngaglik Sleman. Sebagai kelompok yang berkarakter “*primordial*” yang berbasis mahasiswa.

Sesuai dengan tujuan berdirinya, HIMACITA memposisikan diri sebagai organisasi kedaerahan yang ingin memberikan kontribusi pemikiran terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap.¹ Latar belakang berdirinya HIMACITA merupakan pilihan sadar atas tugas dan peran mahasiswa Cilacap sebagai bagian dari masyarakat kabupaten Cilacap yaitu membangun Cilacap ke depan yang lebih baik.

Dari bentangan sejarah berdirinya HIMACITA, terdapat beberapa program kegiatan yang itu berkaitan dengan upaya HIMACITA memberikan kontribusi terhadap Kabupaten Cilacap dalam bidang pembangunan politik. Diantaranya adalah pada masa kepengurusan HIMACITA periode 2012-2013 dengan adanya kegiatan Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Politik pemula yang berhasil diselenggarakan di Kabupaten Cilacap. Kegiatan ini dilakukan atas dasar tanggung jawab HIMACITA sebagai masyarakat yang terdidik merasa resah melihat kondisi realitas yang terjadi di masyarakat mengenai pelaksanaan pemilu yang ada di Indonesia terutama apa yang terdapat di Cilacap guna lebih baik.

Berkenaan dengan penjelasan di atas, saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ *Peranan organisasi mahasiswa dalam pembangunan politik daerah (Studi Kasus Kontribusi Organisasi Mahasiswa “Himpunan Mahasiswa Cilacap di Yogyakarta (HIMACITA) periode 2012-2013”*)”

¹<http://himacita.or.id/>, diakses pada tanggal 14 April 2014, jam 01.25 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana peran organisasi mahasiswa HIMACITA dalam pembangunan politik daerah Kabupaten Cilacap pada periode 2012-2013?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk dapat mengetahui peran organisasi etnis HIMACITA dalam pembangunan politik daerah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu tentang peran organisasi etnis dalam pembangunan politik daerah.
- 2) Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya dalam topik yang relevan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi penulis untuk menjadi pelaku politik yang berguna bagi bangsa kedepannya.
- 2) Memberikan sumbangsih pemikiran bagaimana menjadi mahasiswa politik yang baik dan terbuka dalam bermasyarakat yang demokrasi.
- 3) Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kabupaten Cilacap serta bagi HIMACITA itu sendiri.

D. Kerangka Teori

1. Organisasi Mahasiswa.

Organisasi berasal dari bahasa latin *organum* yang berarti alat atau badan.

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, organisasi adalah susunan atau kesatuan dari

berbagai-bagai bagian (orang dan sebagainya) sehingga merupakan kesatuan yang teratur.² Pada dasarnya ada 3 ciri khusus dari suatu organisasi, yaitu: adanya kelompok manusia, kerjasama yang harmonis, dan kerjasama tersebut berdasar atas hak, kewajiban serta tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.³

Pengertian organisasi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. James D. Money (1974)
Organisasi adalah bentuk dari perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama.
2. Ralph Currier Davis (1951)
Organisasi adalah kelompok orang-orang yang berkerja mencapai tujuan bersama di bawah pimpinan.
3. John D. Millet (1954)
Organisasi adalah sebuah kerangka struktur, sebagai wahana dan wadah pelaksanaan pekerjaan banyak orang untuk mencapai suatu tujuan bersama.
4. Dwight Waldo (1956)
Organisasi adalah struktur hubungan antar manusia berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi.
5. Cyril Soffer (1973)
Organisasi adalah perserikatan orang, yang masing-masing diberi peranan tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian kerja di mana pekerjaan dibagi menjadi

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 1023.

³ Julitriarsa, Djati, *Manajemen Umum*, Yogyakarta: BPFE, 1998, hal. 41.

rincian tugas, diberikan di antara pemegang peranan, dan kemudian digabung ke beberapa bentuk hasil.⁴

6. Melwin Syafrizal Daulay (2004)

Organisasi merupakan suatu wadah tempat berkumpulnya orang-orang (manusia) yang memiliki minat, bakat, tujuan atau cita-cita yang sama. Unsur-unsur utama yang terkait, dan akan mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh keberadaan organisasi adalah (4 M): 1) *Man* (Manusia), 2) *Method* (Sistem), 3) *Money* (Dana), dan 4) *Material* (Bahan).⁵

Sedangkan pengertian Mahasiswa berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang belajar (pelajar) di perguruan tinggi.⁶ Dalam Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 1999, dijelaskan lebih lanjut mengenai mahasiswa sebagai berikut: Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu. Dalam pelaksanaan tugas pengembangan kemahasiswaan sehari-hari diperguruan tinggi, ruang lingkup tugas pembimbing kemahasiswaan dibatasi pada jenjang D3 (S0) dan S1.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka organisasi mahasiswa adalah bentuk kegiatan di perguruan tinggi yang diselenggarakan dengan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa. Organisasi tersebut merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan peningkatan ilmu dan pengetahuan, serta integritas kepribadian mahasiswa. Menurut Paryati Sudarman (2004), Organisasi mahasiswa juga sebagai wadah pengembangan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa di perguruan tinggi yang meliputi pengembangan penalaran, keilmuan, minat, bakat dan

⁴ Sutarto, *Dasar-dasar Organisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006, hal. 36.

⁵ Melwin Syafrizal Daulay. *Pedoman Praktis Manajemen Organisasi Kemahasiswaan Administrasi dan Manajemen Organisasi*, Sleman: Stmik Amikom Yogyakarta, hal. 8.

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, hal. 895.

kegemaran mahasiswa itu sendiri. Hal ini dikuatkan oleh Kepmendikbud RI no. 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di perguruan tinggi, bahwa:⁷

“Organisasi kemahasiswaan intra-perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiaan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.”

Organisasi mahasiswa dalam tatacara manajemen organisasi tidak berbeda jauh dengan organisasi umum lainnya. Hal-hal yang menyebabkan keberadaannya adalah:⁸

1. Dikarenakan kesamaan keyakinan, minat dan bakat anggota, biasanya bertujuan untuk menyalurkan minat dan bakat tersebut dalam suatu wujud kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai suatu prestasi, sebagai kebutuhan fisik, rohani ataupun sekedar penyalur hobi,
2. Dikarenakan tuntutan kebutuhan, keadaan lingkungan yang terjadi saat itu, seperti organisasi layanan sosial untuk bantuan bencana alam, pendidikan bagi masyarakat miskin dan anak terlantar, layanan kesehatan dan keselamatan,
3. Dikarenakan peluang yang ada untuk pengembangan kepribadian atau untuk tujuan provit/keuntungan, misal untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurship atau kewirausahaan, kemandirian dan profesionalisme, dengan membentuk unit koperasi mahasiswa, kelompok marketing, public relation, dan event organization, pembimbing atau asisten pelatihan atau pendidikan profesional.

⁷ <http://home.unpar.ac.id/~bakem/sk%20dikti.htm>, diakses pada tanggal 23 Juni 2014, jam 00.10 WIB

⁸ Melwin Syafrizal Daulay, Pedoman Praktis Manajemen Organisasi Kemahasiswaan Administrasi dan Manajemen Organisasi, hal. 10-11.

4. Dikarenakan tuntunan agama / aktifitas religi seperti unit kerohanian dan lain-lain.
5. Dikarenakan amanat dan tuntutan sivitas akademika untuk mengemban suatu amanat khusus dengan suatu visi dan misi yang jelas sesuai AD/ART, memiliki pedoman GBHK (Garis-garis Besar Haluan Kerja). Misalnya Senat Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Lembaga Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan dan lain-lain. Organisasi ini biasanya merupakan suatu struktur organisasi yang kompleks dengan maksud dan tujuan organisasi seperti diatur pada AD/ART organisasi tersebut.

Menurut Silvia Sukirman (2004), organisasi mahasiswa terdiri dari:

1. Organisasi mahasiswa intra-universiter, disebut juga organisasi mahasiswa di perguruan tinggi, adalah organisasi mahasiswa yang berkedudukan di dalam perguruan tinggi yang bersangkutan. Bentuk-bentuk organisasi kemahasiswaan itu antara lain:
 - a. Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT), merupakan wadah atau badan normatif dan menjadi perwakilan tertinggi mahasiswa dengan tugas pokok mengorganisasikan kegiatan ekstrakurikuler pada tingkat perguruan tinggi.
 - b. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), merupakan wadah kegiatan ekstrakurikuler di perguruan tinggi yang bersifat penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa serta pengabdian masyarakat. Sebagai contoh ada unit kegiatan untuk olahraga seperti basket, sepak bola, bela diri; ada juga unit kegiatan untuk kesenian seperti panduan suara, budaya tradisional.

- c. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), merupakan wadah kegiatan ekstrakurikuler di perguruan tinggi yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan program studi pada jurusan.
2. Organisasi mahasiswa ekstra-universiter, yaitu organisasi mahasiswa yang berkedudukan di luar perguruan tinggi tertentu, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan lain sebagainya.

Organisasi mahasiswa dapat menjadi sarana efektif dalam membantu mahasiswa menemukan kesadaran, kemudian dorongan dan motivasi untuk berprestasi karena ia berada pada lingkungan pergaulan yang mendukung. Mahasiswa yang aktif di organisasi mahasiswa umumnya akan lebih cepat memahami dirinya, menemukan jati diri dan prinsip hidupnya, sehingga mereka dapat mengatur diri dan waktu dengan baik untuk mencapai target-target mereka. Berorganisasi cenderung akan melahirkan pemahaman diri, jati diri, prinsip hidup, karakter, kepercayaan diri dan skill. Organisasi mahasiswa harus menjadi wadah pembelajaran sekaligus wadah pendidikan, atau knowledge resource.⁹

2. Teori Peran (Role Theory)

Peran menurut Jack C. Plano, Robert E. dan Helena S. Robin adalah perangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial.¹⁰

Peran menurut Astrid S Suasanto :¹¹

⁹ Ilham, Artikel: *Motivasi Berprestasi Melalui Organisasi Mahasiswa, Mahasiswa Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Duta Mahasiswa GenRe BKKBN, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.*

¹⁰ Peran menurut Jack C. Plano, Robert E. dan Helena S. Robin terjemahan oleh Edi S Siregar, *Kamus Analisa Politik*, Jakarta, Rajawali Pres, Cetakan kedua, 1998, Hal.220

¹¹ Astrid S Suasanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Jakarta, Bina Cita, 1983, Hal.95.

- a. Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat diartikan juga sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Sedangkan menurut Soejono Soekanto, peranan (*role*) adalah merupakan aspek dinamika dari status (kedudukan) apabila seseorang atau beberapa orang atau organisasi yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia atau merka atau organisasi tersebut telah melaksanakan suatu peranan.¹²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹³

Menurut WJS. Purworatminto Peran adalah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang utama (terjadinya suatu hala atau peristiwa).¹⁴ Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer menjelaskan tentang peran sebagai berikut :

“Peran adalah langkah-langkah (rencana cermat) mengenai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.”

Pendapat lain mengenai definisi peran diungkapkan oleh Blocck sebagai berikut: Suatu konsep yang di[pakai oleh sosiolog untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki

¹² Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Yogyakarta, Rajawali Pres, 1987, Hal.220.

¹³ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia. PN Balai Pustaka, Jakarta, Hal.667.

¹⁴ WJS, Purworatminto. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka, Jakarta, Hal 735.

berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sosial dengan tuntutan peran yang dilakukan.¹⁵

Dari pendapat diatas bahwa konsep peran berhubungan dengan perilaku dan tingka laku seseorang atau kelompok atau tuntutan dari posisi yag didudukinya untuk mempengaruhi pengambilan ataupun pelaksanaan keputusan yang sah bagi masyarakat.

Peran menurut Astrid S Susanto sedikitnya mengandung tiga hal yaitu:¹⁶

- a. Peran adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peran dalam artian ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing orang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peran adalah konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasinya.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Dari ketiga hal tersebut yang penting adalah interaksi antar seseorang yang menjalankan peranan orang yang ada disekitarnya. Ketika interaksi berlangsung dalam kelompok masyarakat, maka individu yang dapat memberi pelayanan lebih serta memiliki kelebihan ganjaran sosial lebih sedikit akan cenderung menentukan interaksi. Dengan kata lain individu/kelompok memiliki kedudukan yang domoan atas individu/kelompok lainnya, dimana itu mempunyai kekuasaan. Sementara itu kedudukan yang dominan dapat pula diperoleh dengan sumber yang lain. Selain kekayaan dan kehormatan, ada juga unsur lain yaitu pengetahuan serta ketrampilan yang diperoleh secara periodik.

¹⁵ Hubert M. Blocck,jr. 1987. Pengantar Penelitian Sosial. Terjemahan Yosogama, Rjawali pres, Jakarta, Hal;105.

¹⁶ Susanto, Astrid. Pengantar sosiologi dan Perubahan Sosial. Bina Cinta, Jakarta, Hal : 95.

Dari pendapat tersebut diatas , maka penulis dapat menyimpulkan bahwa peran adalah perilaku atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang menduduki posisi tertentu dalam rangka membina, membimbing, mengawasi dan mengembangkan tugas-tugasnyadisertai dengan rasa tanggungjawab sesuai dengan aturan yang berlaku demi terciptanya sebuah tujuan yang telah ditentukan.

3. Pembangunan politik

Pakar politik Lucien W. Pye (*Aspects of Political Development*, pada Memajukan Demokrasi mencegah disintegrasi, sebuah wacana Pembangunan Politik oleh Nicolaus Budi Harjanto) memberikan dimensi/unsur dari pembangunan politik sebagai berikut :¹⁷

“Pembangunan politik sebagai : penambahan persamaan (equality) antara individu dalam hubungannya dengan system politik, penambahan kemampuan (capacity) system politik dalam hubungannya dengan lingkungan, dan penambahan pembedaan (differentiation and specialization) lembaga dan struktur di dalam system politik itu. Ketiga dimensi tersebut senantiasa ada pada “Dasar dan jantung proses pembangunan”.

Menurut Pye, dimensi persamaan (*equality*) dalam pembangunan politik berkaitan dengan masalah partisipasi dan keterlibatan rakyat dalam Kegiatan-kegiatan politik, baik yang dimobilisir secara demokratis maupun totaliter. Dalam unsur/dimensi ini dituntut adanya pelaksanaan hukum secara universal, dimana semua orang harus taat kepada hukum yang sama, dan dituntut adanya kecakapan dan

¹⁷NT Budi Harjanto. *Memajukan demokrasi mencegah disintegrasi: sebuah wacana pembangunan politik*. Tiara Wacana Yogya, 1998.

prestasi serta bukan pertimbangan-pertimbangan status berdasarkan suatu system sosial yang tradisional.

Dalam proses pembangunan, dimensi ini berkaitan erat dengan budaya politik, legitimasi dan keterikatan pada system. Sedangkan dimensi kapasitas (*capacity*) dimaksudkan sebagai kemampuan system politik yang dapat dilihat dari output yang dihasilkan dan besarnya pengaruh yang dapat diberikan kepada sistem-sistem lainnya seperti system sosial dan ekonomi. Dimensi ini berhubungan erat prestasi pemerintah yang memiliki wewenang resmi, yang mencerminkan besarnya ruang lingkup dan tingkat prestasi politik dan pemerintahan, efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan umum dan rasionalitas dalam administrasi serta orientasi kebijakan. Sedangkan dimensi diferensiasi dan spesialisasi (*differentiation and specialization*), menunjukkan adanya lembaga-lembaga pemerintahan dan struktur-strukturnya beserta fungsinya masing-masing, yang terdapat pada sistem politik. Dengan diferensiasi berarti bertambah pula pengkhususan atau spesialisasi fungsi dari beberapa peranan politik di dalam sistem. Di samping itu diferensiasi melibatkan pula Masalah integrasi proses-proses dan struktur-struktur yang rumit (Spesialisasi yang didasarkan pada perasaan integrasi keseluruhan).

Adapun definisi lain tentang pembangunan politik menurut Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell (1966) adalah sebagai meningkatnya diferensiasi dan spesialisasi struktur politik dan meningkatnya sekularisasi budaya politik.¹⁸ Pembangunan politik terjadi jika sistem politik berhasil mengatasi tantangan masalah pembangunan negara dan bangsa, distribusi dan lain-lain. Makna pembangunan seperti ini secara umum adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi perilaku sistem politik, serta meningkatkan kespabilitasnya.

¹⁸ C.H. Dodd. (diterjemahkan oleh Dra. Ratnawati). *Pembangunan Politi*. PT Bina Aksara. Jakarta. 1986. Hal, 6

Pembangunan politik menurut J.D. Montgomery dan W.J.Siffin (1966), pembangunan politik sebagai proses yang menciptakan kerangka lembaga untuk menyelesaikan masalah sosial yang terus berkembang.¹⁹

Adapun beberapa tujuan dari pembangunan politik, yaitu :

- a. Meningkatkan komitmen nasional agar mengutamakan kepentingan nasional
- b. Menyusun program pembangunan nasional yang bebas dari kepentingan politik
- c. Meyakinkan tidak adanya satu lembaga konstitusional yang terlalu dominan, melalui mekanisme “checks and balances”
- d. Mencegah timbulnya satu partai politik
- e. Adanya oposisi yang membangun politik yang sehat
- f. Meningkatkan kreativitas dan inovasi di bidang politik untuk mempercepat pembangunan nasional
- g. Meningkatkan pendidikan politik melalui partai, bermuara pada pemilihan aspirasi politik yang sesuai keinginan rakyat.

Sedangkan, gejala/ciri-ciri Pembangunan Politik (Lucian W Pye):²⁰

1. Equality (Persamaan)

Pandangan tentang hal ini menunjukkan bahwa pembangunan politik menyangkut partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik. Dalam kaitannya dengan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik, Samuel P Huntington dan Joan Nelson (1977) memandang bahwa partisipasi politik merupakan ciri utama dari modernisasi politik. Partisipasi politik merupakan kegiatan warganegara untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Kegiatan-kegiatan itu bisa dilakukan warganegara secara pribadi atau

¹⁹ C.H. Dodd (diterjemahkan oleh Dra. Ratnawati). *Pembangunan Politi*. PT Bina Aksara. Jakarta. 1986. Hal, 7

²⁰ NT Budi Harjanto. *Memajukan demokrasi mencegah disintegrasi: sebuah wacana pembangunan politik*. Tiara Wacana Yogya, 1998.

kolektif, terorganisasi atau spontan, terus menerus atau sporadis, damai atau kekerasan, legal atau tidak legal, efektif atau tidak efektif.

Kemudian Huntington dan Nelson mengemukakan bahwa partisipasi politik dalam berbagai bentuk :

a. *Electoral Activity*

Yaitu kegiatan pemilihan umum guna menentukan kepemimpinan nasional, termasuk dalam kegiatan ini antara lain : pemberian suara, pemberian sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam pemilihan, mencari dukungan atau setiap kegiatan yang bertujuan memengaruhi hasil pemilu.

b. *Lobbying*

Yakni meliputi usaha-usaha perseorangan atau kelompok untuk mengadakan hubungan dengan pejabat-pejabat pemerintahan dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud memengaruhi keputusan-keputusan mereka dalam bidang tertentu.

c. *Organizational Activity*

Kegiatan ini menyangkut keikutsertaan anggota atau pimpinan dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

d. *Contacting*

Mencari koneksi, merupakan kegiatan perorangan yang ditujukan kepada pimpinan-pimpinan pemerintahan yang dimaksudkan untuk memberikan keuntungan pada seseorang atau sekelompok kecil anggota masyarakat.

e. *Violence*

Yaitu suatu kegiatan dengan menggunakan cara kekerasan agar pemerintah terpengaruh. Pengaruh tersebut diharapkan akan menyebabkan pemerintah meninjau kembali atau mengubah keputusan-keputusan tertentu.

2. **Capacity (Kapasitas)**

Yang dimaksudkan kapasitas disini adalah kemampuan sistem politik, yaitu mengenai *output* (hasil) sistem politik yang mampu memengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Juga berkaitan dengan kondisi dan prestasi pemerintah yang menyebabkan proses pelaksanaan kebijakan umum menjadi efektif dan efisien. Mengenai kemampuan-kemampuan yang dimiliki sistem politik, menurut Almond dan Powell (1966) terdapat enam jenis, yaitu :

a. *The Extractive Capability*

Kemampuan *ekstraktif* adalah kemampuan sistem politik mengelola sumber-sumber kekayaan alam dan potensi-potensi manusia (*material and human resources*). Kehidupan sistem politik sangat tergantung pada biaya yang dikumpulkan dari kemampuan ekstraktif ini. Pengelolaan kekayaan alam hendaknya berdasarkan azas-azas berikut: azas maksimal, azas lestari, dan azas daya saing.

b. *The Distributive Capability*

Kemampuan *distributif* ini sangat berkaitan dengan kemampuan *ekstraktif*, karena sesudah sistem politik mengelola sumber-sumber kekayaan alam dan potensi manusia, maka sistem politik harus pula menunjukkan kemampuannya mendistribusikan kembali kepada masyarakat. Distribusi barang-barang, jasa, kesempatan, status dan bahkan juga kehormatan dipandang sebagai prestasi nyata sistem politik.

c. *The Regulative Capability*

Kemampuan *regulatif* dimaksudkan bagaimana sistem politik menyelenggarakan pengawasan terhadap tingkah laku individu dan kelompok yang ada di dalamnya. Termasuk penempatan kekuatan-kekuatan yang absah untuk melakukan pengawasan terhadap tingkah laku manusia dan badan lain yang berada dalam sistem.

Bagaimana cara sistem politik membawa kelompok-kelompok atau masyarakat kepada aturan-aturan yang berlaku. Sejauhmana kekuatan aturan-aturan tersebut menjangkau dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat serta bagaimana intensitas campur tangan sistem politik terhadapnya, semuanya merupakan ukuran dari kemampuan *regulatif* ini.

d. *The Responsive Capability*

Kemampuan *responsif* adalah kemampuan daya tanggap sistem politik yang ditentukan oleh hubungan antara *input* (aspirasi masyarakat) dengan *output* (kebijakan pemerintah). Dalam perkembangannya, suatu sistem politik sering menghadapi tuntutan-tuntutan atau tekanan-tekanan yang datang dari lingkungan dalam maupun lingkungan luar. Pertanyaan yang timbul adalah kepada siapa sistem politik bersikap tanggap? Bagaimana cara melaksanakan pola tingkah laku yang tanggap itu?

e. *The Symbolic Capability*

Kemampuan *simbolik* adalah mengalirnya secara efektif simbol-simbol nasional dari sistem politik ke dalam lingkungan dalam maupun lingkungan luar sistem. Misalnya simbol-simbol persatuan nasional antara lain seperti bendera nasional, lambang negara, bahasa nasional, lagu kebangsaan, Pancasila dan sebagainya yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

f. *Domestic and International Capability*

Kemampuan domestik dan internasional menunjukkan keberadaan sistem politik dalam lingkungan *domestik* (dalam negeri) maupun lingkungan internasional (luar negeri).

Sistem politik dalam bekerja, mengadakan hubungan atau interaksi dengan lingkungan domestik dan lingkungan internasional. Karena itu tingkah laku internasional suatu sistem politik bisa dilihat dari segi kemampuan ekstraktif, distributif, regulatif, simbolik dan responsif internasional sistem politik bersangkutan.

3. *Diferensiasi dan Spesialisasi*

Ciri pembangunan politik ini berkaitan dengan analisis tentang struktur dan fungsi. Dengan demikian pembangunan politik pertama-tama mengenai *diferensiasi* dan *spesialisasi* struktur.

Struktur politik terdiri dari lembaga-lembaga politik baik yang ada dalam masyarakat yang disebut sebagai infra struktur politik maupun yang ada dalam pemerintahan disebut supra struktur politik. Infra struktur politik antara lain berfungsi merumuskan segala kepentingan masyarakat dan kemudian menyalurkannya kepada lembaga-lembaga supra struktur politik. Selanjutnya lembaga supra struktur politik memproses segala kepentingan itu untuk menetapkan satu keputusan bersama. Tetapi proses kegiatan yang dilaksanakan oleh supra struktur politik pada hakikatnya berdasarkan aspirasi, dukungan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Lebih lanjut lembaga supra struktur politik berfungsi mengalokasikan kembali nilai-nilai keputusan bersama itu kepada masyarakat.

4. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri terutama berkaitan dengan pemerintahan umum maupun pembangunan, yang sebelumnya diurus pemerintahan pusat. Untuk itu, selain diperlukan kemampuan keuangan, diperlukan juga adanya sumber daya manusia berkualitas, sumber daya alam, modal, dan teknologi.²¹

Tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Sumber daya manusia yang dibutuhkan tersebut antara lain adalah:²²

1. Mempunyai wadah, perilaku, kualitas, tujuan dan kegiatan yang dilandasi dengan keahlian dan ketrampilan tertentu.
2. Kreatif dalam arti mempunyai jiwa inovatif, serta mampu mengantisipasi tantangan maupun perkembangan, termasuk di dalamnya mempunyai etos kerja yang tinggi.
3. Mampu sebagai penggerak swadaya masyarakat yang mempunyai rasa solidaritas sosial yang tinggi, peka terhadap dinamika masyarakat, mampu kerja sama, dan mempunyai orientasi berpikir *people centered orientation*.
4. Mempunyai disiplin yang tinggi dalam arti berpikir konsisten terhadap program, sehingga mampu menjabarkan kebijaksanaan nasional menjadi program operasional pemerintah daerah sesuai dengan rambu-rambu pengertian program urusan yang ditetapkan.

²¹ TB Silalahi, et.al. *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*, PT Sinar Agape Press. Jakarta. 1995. Hal, 48

²² TB Silalahi, et.al. *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*, PT Sinar Agape Press. Jakarta. 1995. Hal, 12

Sedangkan menurut Halim,²³ otonomi daerah secara umum diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU No 22 Tahun 1999 sebagai titik awal pelaksanaan otonomi daerah maka Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat. Untuk menjamin proses desentralisasi berlangsung dan berkesinambungan, pada prinsipnya acuan dasar dari otonomi daerah telah dieujudkan melalui diberlakukannya UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 25 Tahun 1999 serta regulasi pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah No 104 sampai dengan Peraturan Pemerintah No 110 Tahun 2000 yang berlaku efektif 1 Januari 2001.

E. Definisi Konseptual

1. Organisasi Mahasiswa.

Organisasi Mahasiswa adalah sebuah wadah berkumpulnya mahasiswa demi mencapai tujuan bersama namun harus tetap sesuai dengan koridor AD/ART yang disetujui oleh semua anggota dan pengurus organisasi tersebut. Organisasi Mahasiswa tidak boleh keluar dari rambu-rambu utama tugas dan fungsi perguruan tinggi yaitu tri darma perguruan tinggi, tanpa kehilangan daya kritis dan tetap berjuang atas nama mahasiswa, bukan pribadi atau golongan.

2. Teori Peran (*Theory Role*)

Peran adalah perilaku atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang menduduki posisi tertentu dalam rangka membina, membimbing,

²³ Muhammad Karya Satya Azhar. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah*. Jurnal Keuangan & Bisnis Program Studi Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan 2.1 .2010. Hal, 60

mengawasi dan mengembangkan tugas-tugasnya disertai dengan rasa tanggungjawab sesuai dengan aturan yang berlaku demi terciptanya sebuah tujuan yang telah ditentukan.

3. Pembangunan Politik

Pembangunan politik adalah sebagai pertambahan persamaan (*equality*) antara individu dalam hubungannya dengan system politik, pertambahan kemampuan (*capacity*) system politik dalam hubungannya dengan lingkungan, dan pertambahan pembedaan (*differentiation and specialization*) lembaga dan struktur di dalam system politik itu. Ketiga dimensi tersebut senantiasa ada pada dasar dan jantung proses pembangunan.

4. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri terutama berkaitan dengan pemerintahan umum maupun pembangunan, yang sebelumnya diurus pemerintahan pusat. Untuk itu, selain diperlukan kemampuan keuangan, diperlukan juga adanya sumber daya manusia berkualitas, sumber daya alam, modal, dan teknologi.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Peranan organisasi HIMACITA periode 2012-2013 terhadap pembangunan politik Kabupaten Cilacap diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Peningkatan dimensi Persamaan (*equality*)
- b. Peningkatan dimensi kemampuan (*capacity*)
- c. Peningkatan dimensi pertambahan pembedaan (*differentiation and specialization*)

G. Metode Penelitian

Metode adalah aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap berhasil tidaknya suatu penelitian, terutama untuk mengumpulkan data. Sebab data yang diperoleh dalam suatu penelitian merupakan gambaran dari obyek penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong:²⁴

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis cara kualifikasi lainnya. Penelitian kualitatif mementingkan lebih banyak segi proses dari pada hasil. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses”

Metodologi deskripsi adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²⁵ Hal ini juga disebabkan karena metode penelitian kualitatif deskriptif memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah actual dan ia merupakan representative obyek terhadap fenomena yang tanggap.²⁶

2. Unit Analisa Data

Sesuai dengan masalah yang ada pada pokok pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka unit analisa pada penelitian ini adalah pengurus HIMACITA periode tahun 2012-2013.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, 2001, hal. 135.

²⁵ Moh. Natsir, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988. Hal, 6.

²⁶ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1985. Hal, 141.

3. Jenis Data

a. Data primer

Data yang telah diperoleh langsung dari informan berupa data hasil wawancara dan observasi di lapangan terhadap pengurus HIMACITA pada kepengurusan periode tahun 2012-2013.

b. Data sekunder

Data yang didapat dari kajian-kajian sumber yang digunakan sebagai penunjang dalam analisa masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini kami menggunakan kedua jenis data tersebut, yaitu data primer dan data sekunder karena kedua data tersebut saling melengkapi satu sama lain dan sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan sesuai dengan fokus penelitiannya. Pujiriani dan Esti (2009; 36) mengemukakan bahwa pengumpulan data merupakan bagian kedua dari siklus utama riset. Teknik pengumpulan data harus disesuaikan dengan metode penelitian dan fokus penelitian, sehingga mempermudah peneliti untuk memperoleh data yang valid. Menurut Bungin (2008;139) teknik pengumpulan data yang tepat untuk penelitian kualitatif antara lain adalah teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi partisipasi (*participant observer*).

Khususnya pada wawancara mendalam, teknik ini memang merupakan teknik pengumpulan data yang khas bagi peneliti kualitatif. Hanya saja dalam penelitian ini teknik observasi partisipasi tidak bisa diterapkan mengingat periode yang sudah berlalu untuk diteliti, sehingga peneliti tidak mungkin ikut berpartisipasi dalam kegiatan ataupun program kerja dalam kepemimpinan periode 2012-2013 lalu. Berdasarkan

alasan tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara mendalam dan studi dokumentasi.

Berdasarkan tujuan penelitian, maka data yang dibutuhkan bersifat kualitatif.

Untuk itu maka dalam penelitian ini telah digunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif wawancara merupakan alat yang sangat dominan untuk mengumpulkan data, karena dengan wawancara, saya melakukan komunikasi langsung secara mendalam dengan informan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan, pendapat secara lisan sekaligus dapat menarik makna dari keterangan yang dikemukakan informan. Sebagaimana didefinisikan oleh Pujiriyani dan Esti sebagai berikut:²⁷

“Wawancara pada dasarnya adalah proses interaksi antara individu yang bertindak dalam status yang sama, dalam arti ‘yang diteliti’ tidak lagi dilihat sebagai ‘the other’. Dalam kasus wawancara mendalam hendaknya melakukan wawancara berulang-ulang”.

Menurut Bungin mengatakan bahwa materi wawancara adalah tema yang ditanyakan kepada informan, berkisar antara masalah atau tujuan penelitian, materi wawancara yang baik terdiri dari pembukaan, isi dan penutup.²⁸ Di lapangan saya melakukan wawancara dengan para pengurus HIMACITA periode 2012-2013, seperti ketua, sekretaris serta pengurus lain yang diperlukan untuk menjadi informan pada masa periode kepemimpinan 2012-2013.

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

²⁷ Pujiriyani, Dwi Wulan dan Esti Anantasari, *Panduan Penelitian Lapangan Berperspektif Antarbudaya*, Penerbit: PSAP UGM Bekerjasama Dengan Found Foundation. Yogyakarta, 2010. Hal, 41.

²⁸ , Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2008, Hal, 108.

Dokumen adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data, menurut Patton (1980), adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan Bogdan dan Tylor (1975) mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (Ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu.²⁹

Semua data yang diperoleh dari penelitian lapangan saya dianalisis secara kualitatif yang dimulai dengan olah data, yaitu mengkategorisasi/ menggolong-golongkan data yang terkumpul sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian 1, 2, dan seterusnya lalu dibuat transkripnya kata demi kata dengan memisahkan kata, frase atau kalimat yang akan diolah dan yang tidak berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Secara ideal, tidak ada atau kurang sekali data yang tidak relevan terkoleksi karena semuanya diseleksi berdasarkan rumusan masalah yang terurai dalam beberapa pertanyaan penelitian. Kemudian dilakukan reduksi data sebagai langkah kedua dalam analisis. Hal ini terjadi karena melimpahnya data yang sama, artinya, jadi pembuangan

²⁹ Lexsi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, 2001, hal.103

dilakukan karena melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk menjawab setiap pertanyaan penelitian. Reduksi data dilakukan dengan cara peneliti membaca ulang data yang sudah ditranskripkan. Pada bagian tertentu, penulis akan menentukan bagian-bagian yang dianggap penting dan diambil kata kuncinya.